

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Dalam mencapai sebuah tujuan, nilai-nilai yang diharapkan yang diaplikasikan melalui sebuah kebijakan yang dilakukan seseorang atau kelompok tentunya harus bisa menimbang beberapa aspek dalam tindakan proses pembuatan kebijakan tersebut. Kita tahu bahwasannya melihat dari pengertian dari kebijakan itu sendiri tentunya berupa-rupa definisi yang dilontarkan beberapa ahli. Dari berbagai pengertian ini tentunya menjadi alat sebagai rujukan dalam pembuatan kebijakan. Karenanya dalam pembuatan kebijakan tidak bisa dilihat dari satu aspek saja demi mencapai tujuan yang telah diharapkan sebelumnya, supaya tercapai dengan baik. Tujuan tersebut yang mengharuskan lebih fokus terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana, pelayanan publik, pembangunan dan lainnya, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Marshall tentang kebijakan itu sendiri, yaitu kebijakan adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara, melalui pelayanan sosial atau bantuan keuangan¹. Adapun definisi lain mengenai kebijakan yang diungkapkan oleh Friedrich dalam Marshall bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana

¹ Marshall, Stephen. *kebijakan publik* alih bahasa Irman Sibabudin dan Satria. Jakarta. Amelia. 2003. hal 21

terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.²

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa kebijakan adalah produk atau ciptaan yang dibuat oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah itu sendiri yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan bukan hanya sekedar administrasi saja, akan tetapi berisikan perilaku dan harapan. Kebijakan mempunyai sasaran dan tujuan untuk eksternal maupun internal, Kebijakan ini mempunyai hasil akhir, sebuah kebijakan itu muncul ketika adanya suatu proses, kebijakan dalam pembuatannya ataupun pelaksanaannya pasti ada hubungan antar organisasi pemerintah lainnya maupun organisasi kemasyarakatan. Yang paling utama dalam sebuah kebijakan adalah kebijakan dirumuskan dan diartikan secara subjektif (seharusnya).

Untuk mempermudah memahami kebijakan, tentunya harus memahami dulu tentang konsep kebijakan itu sendiri, ada konsep kebijakan yang menurut Wahab:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak secara serta merta dapat membedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai

² Marshall, Stephen. *kebijakan publik* alih bahasa Irman Sibabudin dan Satria.Jakarta.Amelia. 2003.hal 22

6. Kebijakan para penulis buku kebijakan publik dalam mendefinisikan kebijakan (*policy*) tidak lupa memasukan dalam definisinya itu akan perlunya setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi (antar unit-unit dalam lingkungan organisasi tertentu)
9. Kebijakan public, meski tidak eksekutif, menyangkut para kunci lembaga lembaga pemerintah
10. Kebijakan ini dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif.³

Kebijakan bukan hanya bisa diciptakan oleh pemerintah saja melainkan pihak swastapun bisa, dengan fokus pemerintah yang terkaji tentunya kebijakan ini dibuat oleh seseorang, kelompok dari pemerintahan itu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya dan menaruh harapan, tujuan, cita cita seluruh rakyat didalamnya. Sejalan dengan paham kebijakan publik itu merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan maupun diciptakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dan cita cita terpenuhinya kepentingan/kebutuhan masyarakat. Ini sama halnya yang disampaikan oleh Nugroho yang menyimpulkan kebijakan publik meliputi:

³ Wahab, Abdul. *Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. PT Bumi Aksara. 2008. hal 41-59

1. Kebijakan publik mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.⁴

Banyak sekali kebijakan yang berjalan berhasil maupun gagal, kebijakan adalah produk atas dasar dan tidak lepas dari proses, rumusan, analisis. Kebijakan publik boleh dikatakan berhasil atau tidak itu bisa dilihat dari hasil dari prosesnya yang telah ditetapkan itu sendiri, apakah sudah tercapai atau belum, jika belum itu kebijakan bisa dikatakan gagal. Proses kebijakan itu meliputi proses perumusan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Jonas dalam Nugroho menyatakan bahwa proses pembuatan kebijakan dimulai dari analisis yaitu melalui serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dikatakan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung yang diatur menutup waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan dan implementasi kebijakan.⁵

Sebagaimana diatas bahwa dalam membuat kebijakan pasti perlu adanya analisis kebijakan terdahulu untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam tahap maupun proses pembuatan kebijakan tergantung permasalahan yang ada dan diangkat. Dalam pembuatan kebijakannya pun tahap tahap tersebut harus benar benar dijalankan melalui perencanaan yang matang agar tujuan dan sasaran

⁴ Nugroho, Riant. *Kebijakan Pulik model perumusan implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. 2003. hal 52

⁵ *Ibid.* hal 53

kebijakan dapat disampaikan dengan benar dan baik. Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

1. bentuk Peraturan Daerahnya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
4. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.⁶

Berdasarkan pengertian tersebut elemen-elemen penting yang harus ada dalam sebuah kebijakan publik adalah tindakan-tindakan pemerintah yang dilakukan secara objektif tidak hanya sekedar wacana untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara bersama sesuai dengan keinginan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.

B. Proses Kebijakan Publik

1. Penyusunan agenda kebijakan

Dalam membuat sebuah kebijakan tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya rumusan masalah, rumusan masalah ini berfungsi memberikan masukan tentang pengetahuan- pengetahuan yang menyangkut dengan kebijakan yang akan

⁶ Islamy, M,Irfan.*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*.Jakarta.Bumi Aksara. 2007.hal 20

dibuat. Rumusan masalah itu terdiri dari isu-isu yang seharusnya diangkat yang kemudian ini menjadi bahan perhatian kaum elit atau kelompok kepentingan (sebagai penetapan agenda/agenda setting) untuk ditetapkan sebagai agenda kebijakan. Tapi terkadang isu-isu yang diangkat dengan berbagai masalah serta solusi yang ada hilang perhatian dari kaum elit maupun kelompok kepentingan atau sebaliknya (memperoleh perhatian), ini tergantung kekuatan dari kaum elit atau kelompok kepentingan itu sendiri. Kenapa hanya kaum elit dan kelompok kepentingan yang bisa menetapkan sebuah agenda? Ini karena tidak ada lembaga politik atau pun masyarakat yang mempunyai kapasitas menangani semua permasalahan yang ada walaupun dengan solusi alternatif-alternatifnya, ini sejalan dengan pernyataan Hilgartner dan Bosk, penetapan agenda adalah proses dimana masalah dan solusi alternatif memperoleh atau kehilangan perhatian publik dan elit. Persaingan kelompok untuk menetapkan agenda adalah sengit karena tidak ada masyarakat atau lembaga politik yang mempunyai kapasitas menangani semua alternatif yang mungkin untuk semua masalah yang mungkin timbul sekaligus⁷

2. Formulasi Kebijakan

Ketika penyusunan atau penetapan agenda kebijakan selesai, yang kemudian agenda tersebut diangkat ketahap formulasi. Didalam tahap formulasi isu serta solusi alternatifnya harus diselaraskan dengan kajian, informasi yang faktual untuk menjadi bahan ramalan bahwa kebijakan ini disusun dengan informasi dan kajian yang faktual sesuai apa yang terjadi hari ini untuk dijadikan sebagai rujukan

⁷ Fischer.Frank.*Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan metode*.Bandung.Nusa Media. 2014. Hal 90

ramalan dimasa yang akan datang dengan segala konskuensinya, ini sejalan dengan pengertian peramalan (*Forecasting*) didalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik Teori, Konsep dan Metode Karya Subarsono yang menyatakan Peramalah (*Forecasting*) adalah kegiatan untuk menentukan informasi faktual tentang situasi dimasa depan atas dasar informasi yang ada sekarang⁸

Tujuan dari peramalan atas penetapan agenda yang menyangkut kebijakan yang akan dibuat ini pastinya mempunyai tujuan, tujuan dari peramalan (*Forecasting*):

1. Memberikan informasi mengenai kebijakan dimasa depan dan konskuensinya
2. Melakukan kontrol dan intervensi kebijakan guna memengaruhi perubahan, sehingga akan mengurangi resiko yang lebih besar.⁹

Melihat dari pengertian dan tujuan peramalan (*Forecasting*) itu sendiri menyimpulkan bahwa dalam pembuatan kebijakan tentunya harus adanya perumusan masalah yang diselaraskan dengan informasi yang faktual dimasa yang ada sekarang untuk sebagai ramalan dimasa depan atas rujukan informasi faktual tersebut.

3. Adopsi Kebijakan

Atas peramalan yang baik dan matang maka akan menghasilkan sebuah rekomendasi pengetahuan tentang alternatif kebijakan yang paling unggul. Peramalan (*Forecasting*) telah membantu dalam hal peramalan mempersiapkan

⁸ Subarsono. *Analisis Kbeijakan Publik teori, Konsep dan Metode*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2013. hal 37

⁹ *Ibid*.

analisa serta resiko yang akan dialami dimasa yang akan datang. Alternatif kebijakan yang unggul atas dasar peramalannya yang baik secara kondisi ekonomi, sosial dan politik maka ini diangkat ke tahap adopsi kebijakan. dalam tahap ini *Policy Makers* sangat berperan penting dalam mengadopsi kebijakan, calon kebijakan yang paling unggul dengan berbagai konsekuensi terbaiklah yang harus diambil oleh para pengambil kebijakan. jika pengambil kebijakan salah dalam menentukan sebuah kebijakan ini akan mempengaruhi dampak atas kebijakan tersebut. Pengambil kebijakan harus mengadopsi calon kebijakan harus sesuai dengan kriteria yang jelas dan transparan, jadi ketika gagal atau berhasilnya sebuah kebijakan akan ada alasan yang jelas pula. Ini sejalan dengan pendapat Subarsono¹⁰ didalam bukunya yang berjudul Analisa Kebijakan Publik Teori, Konsep dan Metode, proses pemilihan alternatif kebijakan membutuhkan perhatian yang cermat agar pembuat kebijakan tidak terjebak pada pilihan yang hanya kepentingan kelompok tertentu atau bias politik.

4. Implementasi Kebijakan

Ibarat memilih baju dengan waktu lama dan mendapatkan baju yang bagus, tapi tidak dipakai itu bisa membuang waktu percuma. Seperti halnya kebijakan. pada tahap adopsi yang telah dipilih oleh pembuat kebijakan dengan segala kriteria terbaik maka langkah selanjutnya harus diaplikasikan atau diimplementasikan. Dalam pengimplementasian ini atas adopsi kebijakan yang terbaik pun belum tentu bisa berhasil atau sesuai dengan peramalan, ini tergantung atas implementasi kebijakan itu sendiri karena banyak variabel yang harus diperhatikan untuk

¹⁰ *Ibid.hal 65*

mengsukseskan sebuah kebijakan. kita tahu bahwa implementasi kebijakan itu melibatkan para birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur kelompok sasaran. Ini sejalan dengan pernyataan Subarsono¹¹ didalam buku yang sama, kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *Policy Makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implemenasinya. Ada banyak *variabel* yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individu, kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

5. Penilaian Kebijakan

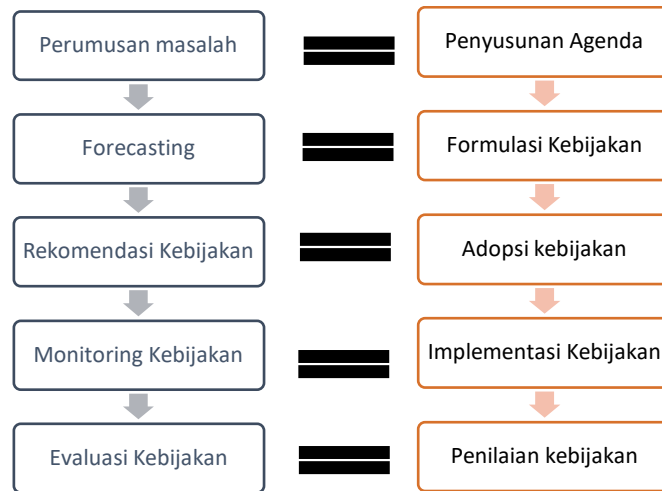
Pemantauan (*monitoring*) bertujuan memantau akibat-akibat yang muncul dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap kebijakan. Evaluasi (penilaian) bertujuan memantau pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diterapkan dan yang benar benar dihasilkan. Evaluasi membantu pengambilan kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah terselesaikan, tetapi juga menyumbangkan pada klarifikasi dan kritik

¹¹ *Ibid.* hal 87

terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu penyesuaian dan perumusan kembali masalah.¹²

¹² Herabuddin. *Studi kebijakan pemerintah dari filosofi ke implementasi*. pustaka setia. Bandung. 2016. hal 56-58

Ini sejalan dengan william Dunn dalam buku Dwi Indiahono¹³ yang berjudul Kebijakan publik tentang proses kebijakan publik, yaitu:



Sumber: Dunn,1994:17

Tahap	Karakteristik
Perumusan masalah	memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
<i>Forecasting</i> (peramalan)	Memberikan informasi mengenai konskuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan
Rekomendasi kebijakan	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi
Monitoring Kebijakan	Memberikan informasi mengenai konskuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala kendalla
Evaluasi kebijakan	Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Sumber: Subarsono, (2005: 10)

¹³ Indiahono. *Kebijakan Publik*. gava media. yogyakarta. 2009. hal 20-21

Tabel diatas menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki dimensi yang sangat luas dari mulai identifikasi masalah publik, desain program atau kebijakan, implementasi, monitoring hingga evaluasi kebijakan.¹⁴

C. Implementasi Kebijakan

Setelah adanya rumusan dari pembuatan kebijaka tentunya harus diterapkan atau dijalankan, pada hakikatnya peraturan yang berbentuk kebijakan harus diaplikasikan melalui program-program dan lainnya yang ditaati oleh pembuat, pelaksana, serta masyarakat yang sering disebut sebagai implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini salah satu cara untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nugroho mengatakan bahwa untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau formulasi derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa dalam proses mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan yaitu, langsung mengimplementasikan dari bentuk program-program atau mengimplementasikan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat jalur birokrasi, melainkan lebih dari menyangkut masalah konflik, keputusan dan dampak yang akan timbul jika suatu kebijakan implementasikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dari keseluruhan proses

¹⁴ Indiahono. *Kebijakan Publik*. gava media. yogyakarta. 2009. hal 20-21

¹⁵ Nugroho, Riant. *Kebijakan Pulik model perumusan implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. 2003. hal 158

kebijakan. Kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila implementasi kebijakan dilaksanakan dengan maksimal. Tachjan mengatakan implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top down* maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau *mark up* menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau makro.¹⁶

Menurut pernyataan tersebut, bahwa implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan yang dilakukan setelah kebijakan selesai dirumuskan. Implementasi merupakan tahap paling penting karena pada tahap ini kebijakan dapat dinilai berhasil atau tidaknya. Pengertian implementasi menurut Indiahono, implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel dilapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan. *Output* adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. *Outcomes* adalah dampak dari kebijakan yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.¹⁷

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan paling penting dalam suatu kebijakan publik, karena berhasil tidaknya suatu kebijakan terletak bagaimana aktor-aktor kebijakan publik melaksanakan atau mengimplementasikan

¹⁶ Tachjan.Reformasi *Administrasi Publik Teori dan Praktek*.Jakarta.Grasindo.2006.hal 25

¹⁷ Indiahino, Dwiyanto.2009.*Kebijakan Publik*.Yogyakarta.Gava Media.2009.hal 153

kebijakan, apakah aktor kebijakan publik mengimplementasikan suatu kebijakan dengan optimal atau tidak dapat dilihat dari hasilnya. Berdasarkan definisi-definisi diatas bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahap implementasi kebijakan kita dapat mengetahui berhasil tidaknya suatu kebijakan dilihat dari hasil yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivato atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksana.

Menurut Nugroho Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasikan antara lain keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lain lain.¹⁸ Sementara Mazmania dan Sabatier yang dikutip oleh menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman- pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk

¹⁸ Nugroho, Riant. *Kebijakan Pulik model perumusan implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. 2003.hal 158-160

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian.¹⁹

Pengertian implementasi diatas apabila diartikan dengan kebijakan menurut pendapat Sunggono bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

¹⁹ Wahab, Abdul. *Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. PT Bumi Aksara. 2008. Hal 55

²⁰ Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta. Siar Grafika. 2014. Hal 137

1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, menurut Winarno merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.²¹

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori Implementasi *Brian. W. Hogwood dan Lewis A. Gun* yang dikutip Wahab yaitu:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat

²¹ Winarno, Budi. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta. PT Buku Seru. 2002.102

- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.²²

Menurut teori implementasi kebijakan *George Edward III* yang dikutip oleh Winarno faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Faktor pertama yang mendukung implementasi adalah transmisi. Seorang pejabat yang menimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber-Sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-

²² Wahab, Abdul. *Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. PT Bumi Aksara. 2008. hal 71-78

tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konskuensi-konskuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.²³

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut *James Anderson* yang dikutip oleh Sunggono, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik karena:

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan

²³ Winarno,Budi.*Kebijakan Publik (Teori,Proses, dan Studi Kasus)*.Jakarta.PT Buku Seru. 2002.hal 126-151

3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah konstitusional dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan.
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi.
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.²⁴

2. Faktor Penghambat Implementasi kebijakan.

Menurut Sunggono, implementasi mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat

²⁴ Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta. Siar Grafika. 2014. hal 144

terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumberdaya-sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi.

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlihat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferentiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.²⁵

Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya. Menurut *james Anderson* yang dikutip oleh Sunggono, faktor

²⁵ Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta. Siar Grafika. 2014. hal 149-153

yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik yaitu:

1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
2. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantar anggota masyarakat yang mencederungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakn publik.
5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.²⁶

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabika dilaksanakan dan mempunyai mandat positif bagi masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perliaku atau perbuatan

²⁶ Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta. Siar Grafika. 2014. hal 144-145

mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

D. Evaluasi Implementasi

Tahap akhir proses kebijakan adalah penilaian mengenai hal-hal yang telah terjadi sebagai akibat pilihan dan implementasi kebijakan. Apabila dipandang perlu, dapat dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang telah dilakukan. Menghasilkan evaluasi yang akurat bukanlah pekerjaan mudah, apalagi untuk mengubah kebijakan apabila ditemukan kesalahan yang memerlukan perbaikan dengan segera. Pada tahap evaluasi, hasil evaluasi sangat berguna bagi pemerintah, terutama untuk menentukan apakah kebijakan atau program tersebut dapat dilanjutkan, dihapuskan, direvisi atau dimodifikasi.

Menurut Nugroho menjelaskan tentang evaluasi, evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan dari kinerja implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.²⁷

Menurut *James P Lester* dan *Joseph Steward Jr (2000)* dalam buku yang sama (nugroho) menjelaskan tentang evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan dikelompokkan menjadi evaluasi proses, berkenaan dengan proses implementasi, evaluasi *impact* yaitu evaluasi yang berkenaan dengan hasil implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki dan evaluasi *meta-evaluasi* yang

²⁷ Nugroho, Riant. *public policy*. PT Elex Komputindo. Jakarta. 2012. hal 706

berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.²⁸

Selanjutnya Nurcholis (2007:277) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh terhadap *input, proses, output dan outcome* dari kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya evaluasi membutuhkan sebuah skema umum penilaian, yaitu:

1. *Input*, yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, meliputi sumberdaya manusia, sarana atau prasarana, sosialisasi kebijakan.
2. *Proses*, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat yang meliputi kejelasan, mekanisme, kepastian, penertiban dan keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan
3. *Output* (hasil), yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. *Output* meliputi tepat tidaknya sasaran yang dituju, sasaran yang tertangani dan kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
4. *Outcome* (dampak), yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan. Meliputi perubahan atau perbaikan, peningkatan dan dampak positif terhadap implementor yang terlibat didalamnya.²⁹

Menurut Subarsono dalam bukunya mengatakan bahwa evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Nurcholis, Hanif. *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Gramedia. Jakarta. 2007. halaman 277

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Melalui evaluasi juga dapat diketahui beberapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan
3. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur seberapa besar dan berkualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila adanya penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan cara antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.³⁰

Sedangkan menurut *Ripley* yang dikutip oleh Herabudin dalam bukunya, evaluasi implementasi secara khusus melakukan evaluasi terhadap proses. Menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pada perspektif apa yang terjadi dan perspektif kepatuhan serta ditujukan untuk melakukan evaluasi aspek-

³⁰ Subarsono. *analisis kebijakan publik.konsep teori dan aplikasi*.pustaka Pelajar. Yogyakarta.2012

aspek dampak kebijakan yang terjadi dalam jangka pendek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi implementasi mempunyai beberapa kegunaan:

1. Menggambarkan realitas yang muncul dengan pola-pola sejauh dapat dilakukan.
2. Menjelaskan pola-pola yang ada termasuk berbagai pengaruh yang ada, arah dan hubungan sebab akibat dari berbagai pengaruh tersebut.
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek proses implementasi pada fase awal program dilaksanakan; bagaimana pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan; bagaimana cara menghadapi perbedaan dari berbagai harapan dan tujuan³¹

Sedangkan fungsi dari evaluasi kebijakan menurut *William N. Dunn* (agustino, 2009:188), yaitu:

1. Memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan program dan kegiatan, yaitu mengenal seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dicapai. Dengan evaluasi dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran dan target tertentu.
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kiritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak

³¹ Herabudin. *Studi kebijakan pemerintahan dari filosofi ke implementasi*. Pustaka setia. Bandung. 2016. hal 164.

memadainya suatu kinerja kebijakan, program dan kegiatan memberikan kontribusi bagi perumusan ulang kebijakan, program dan kegiatan. Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pen definisian alternatif kebijakan, yang bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif yang lain.³²

Dari beberapa pendapat ahli diatas mengenai evaluasi kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai dan mengukur, serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan sebuah program atau kebijakan yang telah dicapai, apakah hasil atau *out put* program tersebut sudah sesuai dengan yang telah direncanakan (*input*) secara efektif dan efisien. Sehingga dapat diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil dari kebijakan tersebut, serta dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi penyimpangan didalamnya.

4. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu peneliti menyampaikan beberapa penelitian mengenai penelitian evaluasi kebijakan publik khususnya peraturan daerah diantaranya melalui jurnal-jurnal yang peneliti unduh pada internet. Peneliti mengambil beberapa penelitian tersebut karena memiliki beberapa kriteria yang menunjang penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun peneliti tulis hal tersebut dalam matriks berikut:

³² Agustino,Leo.*dasar-dasar kebijakan publik*.AIPI.Bandung.2009.hal 188

Tabel 2.1

Matriks Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tri Bambang Haryono. (Implementasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah kabupaten Jenepono no 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.	Beberapa faktor penyebab implementasi kurang maksimal. Dan tidaknya komunikasi yang lebih antar pembuat kebijakan dengan masyarakat serta Peraturan yang digunakan peneliti ini menggunakan peraturan daerah, dan peraturan daerah itu sendiri merupakan hasil kesepakatan dari legislatif dan eksekutif kota itu sendiri.	Dasar pemikiran yang berbeda, penelitian ini lebih mengkritisi tidak sesuai dengan peraturan yang ada dilapangan dan Penelitian ini lebih mengedepankan penerapan undang-undang dilapangan.
2.	JAZULI WIJAYA (analisis kebijakan parkir kota Bandar Lampung)	Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak PAD Kota dari sektor dan Retribusi, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi perparkiran maupun pengelolaan Pendapatan retribusi itu sendiri.	Teori yang dipakai adalah Charles O.Jones, Mengimplementasikan kebijakan adalah proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya.
3	RISKI ATIKA SARI (Strategi Dinas Perhubungan Dalam	Penelitian ini di lakukan oleh Riski Atika Sari. Permasalahan yang melatar belakangi	Peneliti menggunakan analisis SWOT dalam penelitiannya dengan Mempertimbangkan kecocokan antara masalah yang diteliti dengan

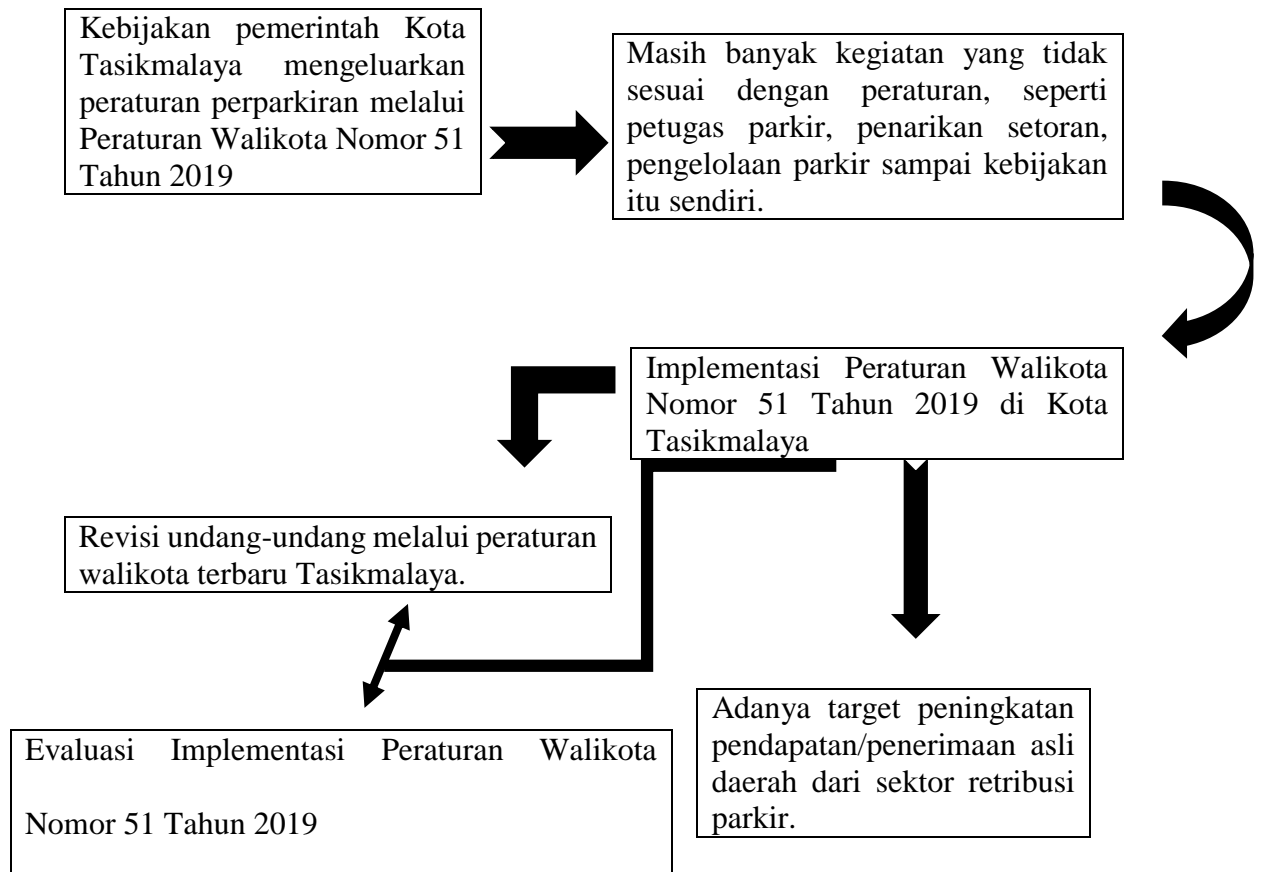
	Menanggulangi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kota Metro (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Metro)	penelitian ini adalah parkir liar di tepi jalan umum Kota Metro yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya lahan parkir tepi jalan umum yang terbatas karena adanya ketentuan untuk parkir tepi jalan umum, petugas parkir yang memanfaatkan lokasi parkir ilegal, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dan tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.	konsep yang digunakan. Dengan analisis SWOT peneliti dapat menguraikan Faktor S, W, O, T dalam mengkaji parkir liar. Setelah itu dapat dianalisis dan ditentukan strategi yang dapat digunakan dalam menanggulangi parkir liar
4	REZKI ANANTAMA (Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Bandar Lampung 2015)	Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah Kota bandar lampung sebagai salah satu daerah yang mengelola retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini belum maksimal dalam merealisasikan target yang ingin dicapai. Hal ini berdasarkan data pada tahun 2015 dimana dari target Rp. 6.600.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp 5.128.277.000.	Teori yang digunakan adalah teori G.R. Terry dalam Hasibuan (2009:38) yaitu: 1. Perencanaan (planning) sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. 2. Pengorganisasian (organization) sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. 3. Penggerakan (actuating) sebagai penggerak organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing 4. Pengawasan (controlling) sebagai pengawas apakah

			gerakan dari organisasi sudah sesuai dengan rencana atau belum.
--	--	--	---

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang diuraikan diatas, diketahui bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengevaluasi Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang perubahan retribusi parkir yang dimana kebijakan ini dikeluarkan dianggap tidak melewati sebuah kajian dan sosialisasai yang baik serta dianggap terlalu praktis dalam mengeluarkan sebuah kebijakan kepala daerah.

Selanjutnya, berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas maka penulis bermaksud untuk mengevaluasi Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KOTA TASIKMALAYA NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTRANG RETRIBUSI JASA”.

2. Kerangka Pemikiran



Dengan adanya sistem otonomi daerah di Indonesia, setiap daerah pun diberikan kebebasan dalam mengembangkan daerahnya masing-masing dengan adanya sistem tersebut. Selain daerah di Indonesia mendapatkan pendapatan dari negara (APBN), ada pun daerah harus mandiri dalam menjalankan pemerintahannya, karena sumber pendapatan daerah tidak hanya dari APBN saja melainkan ada beberapa sumber, seperti pajak dan retribusi. Berbicara tentang pendapatan dari pajak dan retribusi daerah kota Tasikmalaya sudah berdiri lebih dari 18 Tahun dengan adanya sumber pendapatan tersebut. Sebagai bukti nyata dan kepedulian pemerintah terhadap pembangunan daerah khususnya di kota

Tasikmalaya, pemerintah kota Tasikmalaya mengeluarkan sebuah kebijakan tentang perpajakan yang didalamnya ada sumber pendapatan yaitu dalam sektor retribusi perpajakan. Pemerintah sendiri mengeluarkan kebijakan tersebut melalui Peraturan daerah dan Peraturan Walikota. Peraturan tersebut mengatur semua tentang kebijakan perpajakan yang dibungkus dalam peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan walikota tentang perubahan tarif retribusi parkir di tepi jalan atas perubahan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011.

Dalam pelaksanaan peraturan tersebut di kota Tasikmalaya dirasa masih banyak kekurangan, dengan dibuktikan beberapa penemuan seperti banyak petugas parkir yang ilegal dan pemberian karcis pun tidak dilaksanakan, serta yang paling sering terjadi adalah adanya kebocoran uang setoran sebagai retribusi parkir dan dimasukan ke kas negara. Dalam kasus ini terlihat bahwa pengelolaan parkir di kota Tasikmalaya masih belum beres, dan dalam perkembangannya pun pemerintah kota Tasikmalaya mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan tarif retribusi parkir. Perwal ini dikeluarkan untuk meningkatkan capaian target atas peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir.

